

Berita Acara Pemberian Penjelasan

RENOVASI GEDUNG KANTOR GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 045.2.P2/26.4.a/BPBJNTB/2024

Pada hari ini, 5 Juli 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	9020037
Nama Tender	:	Renovasi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nilai Total HPS	:	Rp. 35.534.000.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

- Bab

Pertanyaan Peserta 132864037 5 Juli 2024 09:08

mengingat dari pengumuman tender sampai dengan Upload Dokumen Penawaran yg waktunya sangat singkat sekali tidak sampai seminggu. Dalam dokumen ada 6 item dukungan yg harus dipenuhi mungkin perlu dipertimbangkan lagi karena kami harus mencari ke pulau Jawa yang tidak bisa sehari dua hari seperti dukungan Lift, Atap Transparan yg memang sangat sulit di NTB. Mohon dipertimbangkan kembali waktunya.

Jawaban Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi Tim 28 5 Juli 2024 11:09

Akan dipertimbangkan untuk dikordinasikan dengan PPK

Dokumen Pemilihan - Bab LDK

Pertanyaan Peserta 132862037 5 Juli 2024 09:22

Kepada Pokja,,,

Renovasi dan Perluasan Kantor Gubernur termasuk dalam kelompok Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Pemerintah Pusat/Daerah (BG009) yg dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Peraturan Menteri PU No. 22 /PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pada ketentuan LDK (Lembar Data Kualifikasi), disyaratkan memiliki SBU BG004 KBLI 2015 atau BG002 KBLI 2020.

1. Berdasarkan hal tersebut, mengingat masa berlaku SBU BG004 KBLI 2015 saat ini sudah tidak ada yang berlaku, bolehkan menggunakan SBU BG004 atau BG009 yang masih berlaku?

2. Berdasarkan ketentuan peralihan pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 bahwa Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan dan Sertifikat Badan Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

3. Merujuk ketentuan pasal 46 ayat 4 Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 bahwa SBU yang menggunakan Subklasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 /PRT/M/2011 tentang pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi serta Tim Penyelenggara Sertifikasi, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

Mohon kepada pokja utk segera ditanggapi,,, dikarenakan waktu upload penawaran hanya tinggal 4 hari lagi...

Terima kasih,,,

Jawaban Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi Tim 28 5 Juli 2024 14:49

Terima kasih atas pertanyaanya, dapat kami jawab sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M/2018 dalam pasal 13 dijelaskan Bagunan Gedung Negara memenuhi Klasifikasi, Stadar luas dan jumlah lantai dan dikelompokkan menjadi 3 yaitu a. Bangunan Gedung kantor b. Rumah Negara dan c. Bangunan Gedung Negara Lainnya. Dan berdasarkan Permen PUPR no 6 tahun 2021 tentang Stadar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko sektor pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat. Dalam lampiran I sudah dijelaskan untuk pekerjaan Gedung Perkantoran (Konstruksi Gedung Perkantoran) menggunakan BG002 termasuk didalam Kegiatan Perubahan dan Renovasi Gedung Perkantoran. Sehingga untuk Renovasi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat mensyaratkan sesuai dengan peruntukannya dan klasifikasi masuk dalam Bangunan Gedung Kantor. Sesuai dengan Permen PUPR no 8 tahun 2022 tentang tata cara Pelaksanaan pemenuhan Sertifikat standar jasa Konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi dalam lampiran 1 huruf M. Acuan Penyetaraan Subklasifikasi dan Klasifikasi KBLI 2015/KBLI2017 menjadi Subklasifikasi KBLI 2020 bagian 2) Pekerjaan Konstruksi bersifat Umum Bersifat Spesialis dan Pekerjaan Konstruksi Terintegritas maka untuk itu tender ini menggunakan SBU BG004 KBLI 2015/KBLI 2017 tetap masih berlaku sampai habis masa lakunya.
2. Benar untuk persyaratan tersebut Sesuai dengan peraturan peralihan tetap masih berlaku sampai habis masa lakunya .
3. Sesuai dengan ketetuan tersebut tetap masih berlaku dengan ketetuan sampai berakhir masa lakunya yang tertuang dalam SBU yang diterbitkan.

- Bab

Pertanyaan Peserta 132795037 5 Juli 2024 09:38

kepada yth : Pokja Pemilihan

untuk waktu upload penawaran mohon untuk bisa di undur agar kami para rekanan bisa memiliki waktu untuk mengurus dukungan dan perjanjian sewa peralatan yang sebagian besar ada di pulau jawa, kami mohon waktu yang diberikan untuk batas akhir upload penawaran minimal 5 hari kerja setelah berita acara pemberian penjelasan diterbitkan...

Jawaban Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi Tim 28 5 Juli 2024 11:09

Akan dipertimbangkan untuk dikoordinasikan dengan PPK

- Bab

Pertanyaan Peserta 132864037 5 Juli 2024 10:57

Ini benar-benar di press waktunya kalau diundur waktu pemasukan dokumen lelangnya pasti waktu pelaksanaannya akan berkurang dari 150 hari.....

Bagaimana pak PPK lelang ini.... Dokumen persyaratan Dukungannya sangat banyak dan waktunya sangat singkat. Apa sdh dipikir matang masalah pelaksanaannya, apalagi tadi pagi kami baca di Media sosial bahwa DPRD NTB meminta untuk di tunda pelaksanaan ini. Terima kasih

Jawaban Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi Tim 28 5 Juli 2024 11:10

Akan dipertimbangkan untuk dikoordinasikan dengan PPK

- Bab

Pertanyaan Peserta 132736037 5 Juli 2024 11:53

Jika permohonan untuk perpanjangan waktu untuk upload penawaran tidak diundur, maka dengan kami menduga ini sudah tidak bisa diberikan untuk bersaing secara sehat..dan dalam ketentuan Perpress tentang pengadaan barang jasa wajib memberikan waktu yang cukup untuk mengurus atau mendapatkan dukungan pabrik dari distributor untuk bahan yang tidak ada di lombok... terimakasih

Jawaban Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi Tim 28 5 Juli 2024 14:50

Akan dipertimbangkan untuk dikordinasikan dengan PPK

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat

ttd,

Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi Tim 28